



PEMBINAAN AUDIT UNTUK MEMINIMALISIR KESALAHAN PRAKTIK AKUNTANSI DIGITAL PADA LPD DESA ADAT TANJUNG BENOA

Oleh

Putu Ayu Anggya Agustina¹, Rini Subekti², Elisabeth Ria Viana Praningtyas³

^{1,2,3}Universitas Terbuka

E-mail: ¹anggyagustina@ecampus.ut.ac.id

Article History:

Received: 03-03-2024

Revised: 24-03-2024

Accepted: 07-04-2024

Keywords:

Akuntansi, Audit, Bali,
Digital, Laporan Keuangan

Abstract: LPD menjadi salah satu lembaga keuangan non-profit, sehingga LPD bukan merupakan subjek pajak. Selain itu LPD juga memberikan kontribusi pada desa sebesar 20% untuk membantu masyarakat desa. Dalam operasionalnya LPD masih menerapkan nilai lokalitas Tri Hita Karana. Hal ini ditunjukkan pada pengurus LPD yang mampu menjaga harmonisasi kepada pengurus desa dan masyarakat lingkungan desa. Salah satu LPD yang memberikan kontribusi tiap tahun adalah LPD Desa Adat Tanjung Benoa. LPD ini tidak menjadi subjek pajak, bukan berarti LPD ini tidak diaudit. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dijelaskan bahwa LPD wajib diaudit setahun sekali. LPD Desa Adat Tanjung Benoa sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, dalam praktik akuntansi masih saja ada kekurangan dalam mengarsipkan dokumen pendukung secara manual. Selain itu, belum terbentuk adanya regenerasi yang bertanggung jawab untuk mengarsipkan dokumen secara digital. Adanya kekurangan ini, maka LPD sangat perlu diberikan pembinaan audit untuk meminimalisir kesalahan praktik akuntansi digital

PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat desa pakraman (Sara, 2021). Kontribusi LPD ini memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Adapun peran LPD ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa pakraman, seperti memberikan dana untuk membangun pura dan pelaksanaan upacara. Bantuan ini yang menggambarkan tingginya nilai spiritualitas pada LPD (Putra & Muliati, 2020; Setini et al. 2022). Selain nilai spiritualitas, Putra et al. (2022) dan Saputra et al. (2022) menjelaskan bahwa LPD juga menerapkan nilai lokalitas Tri Hita Karana dalam aktivitas operasional, yang terdiri dari *parahyangan* (ketuhanan), *pawongan* (kemanusiaan), dan *palemahan* (harmonisasi dengan alam sekitar).

Aktivitas LPD tidak masuk dalam kriteria subjek pajak karena LPD memberikan 20% kepada masyarakat desa pakraman. Dalam hal ini LPD mempunyai karakteristik khusus yang mana antara hubungan emosional masyarakat desa adat dengan pengurus LPD yang merupakan masyarakat desa tersebut. Adanya karakteristik ini membuat laporan keuangan



tahunan LPD tidak semuanya diaudit oleh auditor independen. Sebab, audit terhadap laporan keuangan masih dilakukan secara sukarela oleh auditor independen atas permintaan LPD atau pemerintah pada daerah tersebut. Aturan mengenai Struktur kepemilikan LPD sepenuhnya milik desa adat ini ditegaskan dengan Surat Gubernur Bali No. B27.500/5496/PEDA/DPMA tertanggal 20 Desember 2022. Struktur kepemilikan ini yang menjadi pembeda LPD dengan koperasi, bank perkreditan rakyat, atau bank umum lainnya untuk mendukung UU No. 1 Tahun 2013. Secara filosofis keberadaan LPD sudah dikembalikan kepada masyarakat adat setempat (Darmayasa, 2023).

Media digital Bali Post tertanggal 29 Maret 2021 yang telah melansirkan berita bahwa LPD wajib diaudit sekali dalam setahun sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Adanya aturan tersebut, LPD dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik jika ada permintaan dari krama desa pakraman selaku pemilik, maka dalam hal ini pengawas dan anggota LPD berhak untuk meminta auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen LPD yang bersangkutan jika pengawas tidak mampu melakukannya.

Pada pengabdian ini, salah satu LPD yang dituju adalah LPD Desa Adat Tanjung Bena. Sebab, LPD ini terletak di daerah pariwisata. Jika pariwisata meningkat, ada implikasi pada LPD. Implikasi tersebut, membuat LPD aktif beroperasi dibandingkan pada saat terjadinya pandemi *covid-19*. Ketika fase lonjakan *covid-19* sudah berkurang membuat Kecamatan Tanjung Bena kembali beraktivitas normal. Dengan demikian aktivitas operasional LPD juga berjalan dengan normal. Aktivitas LPD pada tahun ini sudah berjalan dengan baik, namun dalam praktik akuntansi masih saja ada kekurangannya. LPD Desa Adat Tanjung Bena juga sudah memenuhi kewajiban tiap tahun untuk diaudit oleh pihak Eksternal Kantor Akuntan Publik. Kekurangan yang menjadi alasan pengabdian memilih LPD ini adalah masih terdapat data yang diback up manual, sehingga perlu memberikan sosialisasi penyimpanan atau arsip dokumen keuangan secara digital untuk memudahkan proses audit. Kelebihannya LPD ini sudah menata dengan rapi histori data keuangan, tetapi hal ini juga bisa menjadi kekurangan apabila yang menata hanya satu orang saja. Jadi, jika nanti ada pergantian pengurus membuat pengurus baru menjadi tidak paham terkait dasar dari data yang menjadi sampel audit.

Adanya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan dapat merubah kebiasaan pengurus LPD untuk bisa menata file dan mengajarkan juga pada pengurus baru untuk mengarsipkan data secara digital untuk mempermudah mencari data saat ada audit eksternal. Oleh karena itu, pengurus LPD perlu diberikan pembinaan terkait audit laporan keuangan, sehingga proses audit juga berjalan dengan lancar. Pengurus LPD juga diberikan sosialisasi agar menata dokumen keuangan secara digital, sehingga auditor mudah melihat data pendukung laporan keuangan LPD.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan bertempat di LPD Desa Adat Tanjung Bena yang berlokasi di Jalan Segara Ening, Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dilaksanakan pada bulan 29 Januari sampai dengan 25 April 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, yakni: 1) koordinasi dan rapat persiapan, 2) pelaksanaan kegiatan, serta 3) Edukasi



(Pembinaan).

HASIL

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pengabdian, maka hasil yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Rapat Persiapan

Diawali dari koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Badung Provinsi Bali (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Badung). Koordinasi dilakukan selama satu hari karena sudah mengetahui LPD yang akan diberikan pembinaan audit. Pemilihan tertuju pada LPD Desa adat Tanjung Benoa karena berada di dekat pesisir pantai dan daerah wisata. Selaian itu, LPD Desa Adat Tanjung juga memiliki komitmen membantu masyarakat setiap hari raya Galungan serta setiap hari raya Nyepi. Hal ini penting bagi LPD untuk bisa mengalokasikan dana yang dimiliki untuk aktivitas operasional dan kebutuhan desa pakraman, sehingga bantuan tersebut menjadi tepat guna. LPD tanpa laporan keuangan akan menyulitkan aktivitas operasional, sehingga memerlukan jasa audit untuk membuat laporan keuangan yang sesuai kaidah akuntansi yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan peraturan Gubernur Bali. Di samping itu, untuk menjaga transparansi serta mempertajakan kepercayaan masyarakat desa pakraman, maka pengabdian menawarkan untuk membina pengurus LPD untuk mempersiapkan laporan keuangan yang akan diaudit dan meminimalisir kesalahan praktik akuntansi.



Gambar 1. Persiapan, Koordinasi, dan Penyuluhan dengan Sekretaris Dinas



Gambar 2. Koordinasi dengan LPLPD

2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di LPD yang langsung melibatkan pengurus yang bertanggung jawab atas laporan keuangan LPD. Hal ini memberikan temuan bahwa kegiatan pengabdian ini telah memberikan tambahan pengetahuan kepada pengurus LPD terkait kesalahan pencatatan akuntansi, serta memberikan saran untuk selalu memback up data secara digital. Jumlah pengurus LPD yang aktif sebanyak 10 orang.



Gambar 3. Sosialisasi terkait Pencatatan Akuntansi serta Pengarsipan Dokumen untuk Dasar Pembuatan Laporan Keuangan

3) Edukasi

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan memberikan panduan untuk menyimpan atau mengarsipkan dokumentasi setiap data akuntansi yang akan diinput. Pada kenyataannya, LPD Tanjung Benoa sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan pararem desa. Namun, masih terdapat arsip atau dokumen yang dikerjakan secara manual melalui buku tulis. Jika ini tetap berlanjut dilakukan akan berdampak pada histori data keuangan LPD. Adanya temuan tersebut, maka pengabdi memberikan pelatihan untuk tetap mendokumentasikan data secara manual menggunakan *google drive* yang berlangganan. Selain itu, diberikan juga pengetahuan agar pengurus LPD menata bukti pendukung yang menjadi acuan untuk membuat laporan keuangan, sehingga saat akan dilaksanakan audit, dokumen pendukung tersebut mudah untuk



dicari.



Gambar 4. Sosialisasi untuk *Back Up* Data LPD Manual



Gambar 5. Sosialisasi untuk *Back Up* Data LPD digital menggunakan *Google Drive*



Gambar 6. Pembinaan untuk Persiapan Audit Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada LPD Desa Adat ini masih di tahap dasar, sehingga memerlukan waktu tiga bulan untuk membina pengurus LPD yang masih memiliki keterbatasan dalam mengarsipkan data secara digital. Namun, di sisi lain LPD ini sudah benar dalam mendata dokumen yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Sebab data yang



diaudit memerlukan data histori agar kesalahan yang bisa terjadi, dapat ditindaklanjuti lebih mudah karena memiliki histori yang rapi dan sudah *back up* data secara digital. Selain itu, praktik akuntansi keperilakuan yang sudah berdasarkan nilai Tri Hita Karana ini tetap harus dibudayakan agar harmonisasi antaran pengurus LPD, pengurus Desa, serta masyarakat di lingkungan desa tersebut tetap terjaga. Terlebih lagi, daerah Tanjung Bena merupakan daerah wisata, sehingga jika ada wisatawan yang menukarkan mata uang asing kepada LPD tidak bertentangan dengan praktik akuntansi LPD. Pelaksanaan kegiatan atau pengabdian menyarankan agar Pengurus LPD juga bisa mengajarkan ke pengurus yang masih muda sebagai awal persiapan generasi baru dengan memahami Pawongan, yakni kerangka penyusunan laporan keuangan LPD.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, kegiatan ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengabdian masyarakat ini dan dapat selesai dengan baik dan lancar, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung, serta kepada pengurus LPD yang memberika izin pengabdian untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi di LPD.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Balipost. (2021). Ratusan LPD di Badung Diaudit. <https://www.balipost.com/news/2021/03/29/183598/Ratusan-LPD-di-Badung-Diaudit.html> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2024)
- [2] Darmayasa, I N. (2023). Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 98-114. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.07>
- [3] Putra, I. G. C., Kepramareni, P., & Novitasari, L. G. (2022). Implementation of Tri Hita Karana Culture in Encouraging the Implementation of Accounting Information Systems towards Business Continuity. *International Journal of Knowledge-Based Development*, 12(3/4), 240. <https://doi.org/10.1504/ijkbd.2022.128898>
- [4] Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- [5] Saputra, K. A. K., Mu'ah, M., Jurana, J., Korompis, C. W., & Manurung, D. T. H. (2022). Fraud Prevention Determinants: A Balinese Cultural Overview. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, 16(3), 167-181. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i3.11>
- [6] Sara, I. M. (2021). Potensi Rush Money dalam Pertimbangan Melakukan Audit Eksternal Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 1000-1010. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/32885>.
- [7] Setini, M., Sara, I. M., & Tantra, I. G. (2022). Sinergi Inovasi, Modal Budaya, dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Kesejahteraan UMKM. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(1), 58-76. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i1.5079>